

**Implementasi Kebijakan Program Relawan Demokrasi Oleh KPU Kota Padang**

**( Studi Pada Pilkada 2018 )**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*

*Di Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



**KURNIA HARIANTO**

**NIM 2014/14052046**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2019**

### PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Program Relawan Demokrasi Oleh KPU  
Kota Padang (Studi Pada Pilkada 2018)  
Nama : Kurnia Harianto  
TM/ NIM : 2014 / 14052046  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 16 Mei 2019

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dra. Al Rafni, M.Si  
NIP. 19680212 199303 2 001

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

Pada hari Kamis, Tanggal 9 Mei 2019 Pukul 08.30 s/d 10.30 WIB

**Implementasi Kebijakan Program Relawan Demokrasi Oleh KPU Kota Padang (Studi  
Pada Pilkada 2018)**

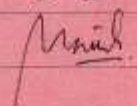
|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Nama          | : Kurnia Harianto                          |
| TM / Nim      | : 2014 / 14052046                          |
| Program Studi | : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Jurusan       | : Ilmu Sosial Politik                      |
| Fakultas      | : Ilmu Sosial                              |

Padang, 16 Mei 2019

Tim Penguji:

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Nama    |                                        |
| Ketua   | : Dra. Al Rafni, M. Si                 |
| Anggota | : Susi Fitria Dewi S.Sos., M.Si., Ph.D |
| Anggota | : Yusnanik Bakhtiar, S.H., LL.M        |

Tanda Tangan



## PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tugas akhir berupa skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Relawan Demokrasi Oleh KPU Kota Padang ( Studi Pada Pilkada 2018)" adalah asli karya saya sendiri;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan menyebutkan pengarang dan dicantumkan pada kepustakaan;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat penyimpangan di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 16 Mei 2019  
Saya yang menyatakan



Kurnia Harianto  
NIM 14052046

## **ABSTRAK**

**Kurnia Harianto (14052046/2014) : Implementasi Kebijakan Program**

**Relawan Demokrasi oleh KPU Kota**

**Padang (Studi Pada Pilkada 2018)**

Jumlah pemilih pada pemilihan umum (Pemilu) pascareformasi cenderung menurun. Realita tersebut membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil kebijakan Relawan Demokrasi (Relasi) yang pengelolanya berada di KPU di level Kota atau Kabupaten. Tujuan utama dari kebijakan Relawan Demokrasi adalah meningkatkan partisipasi pemilih. Di Kota Padang, kebijakan Program tersebut dinilai berhasil. Ini dapat dilihat dari partisipasi pemilih pada pilkada 2013 yang hanya sekitar 52%, menurun dari pilkada 2008 dimana tingkat partisipasi masyarakat Kota Padang sekitar 56% dan kemudian pada pilkada 2018 di mana terdapat kebijakan Relawan Demokrasi tingkat partisipasi masyarakat naik 12% dengan tingkat partisipasi 64%. Hal tersebut dapat secara ilmiah diteliti tentang bagaimana implementasi program relawan demokrasi oleh KPU pada Pilkada Kota Padang 2018 jika dilihat dari faktor-faktor keberhasilannya. Metode penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapat bahwa implementasi kebijakan program relawan demokrasi di KPU pada Pilkada Kota Padang terdapat faktor keberhasilan seperti komunikasi yang sudah efektif, sumber daya relawan demokrasi yang mencukupi, walaupun anggarannya terbatas, disposisi, dimana para relawan demokrasi memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan program ini, dan struktur birokrasi, KPU memiliki standar operasional (SOP) dan tugas pokok yang jelas. Tujuan penelitian adalah sebagai salah satu evaluasi dalam kebijakan yang diambil KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

**Kata Kunci:** Implementasi, Relawan Demokrasi, Pilkada 2018

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi wabarakatuh

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian yang berjudul ***“Implementasi Kebijakan Program Relawan Demokrasi oleh KPU Kota Padang (Studi Pada Pilkada 2018)”***

Shalawat beserta salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan perubahan kepada umat manusia untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan dan berakhlakul kharimah. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Terwujudnya proposal ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Ibu Al Rafni M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, fikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr.Fatmariza M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
4. Seluruh Bapak/Ibu Karyawan Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Teristimewa untuk Orang tua, kakak, adik, dan keluarga besar penulis yang selalu mendo'akan dan memberii dukungan moril, materil, serta kasih sayang yang tak ternilai

harganya. Terimakasih untuk setiap tetesan keringat yang diberikan demi menguliahkan Ananda. Untuk sahabat-sahabatku tersayang, dan teman-teman seperjuangan, PPKN angkatan 2014 tercinta, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga segala bimbingan dan dorongan serta perhatian yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin.

Penulis menyadari dengan segala kekurangan dan keterbatasan dari penulis, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

**Penulis**

## DAFTAR ISI

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                 | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                           | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                               | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL. ....</b>                                            | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                            | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                          | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                             |             |
| A. Latar Belakang .....                                              | 1           |
| B. Identifikasi Masalah.....                                         | 8           |
| C. Batasan Masalah .....                                             | 8           |
| D. Rumusan Masalah.....                                              | 9           |
| E. Tujuan Penelitian .....                                           | 9           |
| F. Manfaat Penelitian .....                                          | 9           |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>                                         |             |
| A. Tinjauan Pustaka .....                                            | 11          |
| 1. Implementasi kebijakan .....                                      | 11          |
| 2. Model implementasi kebijakan .....                                | 12          |
| a. Model Implementasi menurut Brian W Hogwood dan Lewis A Gunn. .... | 13          |
| b. Model Implementasi Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier .         | 14          |
| c. Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. ...            | 14          |
| d. Model Implementasi menurut George C. Edward III. ....             | 17          |
| 3. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan .....             | 22          |
| 4. Relawan Demokrasi .....                                           | 23          |
| a. Dasar Hukum Relawan Demokrasi .....                               | 23          |
| b. Tujuan Relawan Demokrasi .....                                    | 24          |
| c. Rekrutmen Relawan Demokrasi .....                                 | 25          |
| 5. Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) .....                      | 27          |
| 6. Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Pilkada .....                         | 28          |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>                                 |             |
| A. Jenis Penelitian.....                                             | 32          |
| B. Lokasi Penelitian.....                                            | 33          |
| C. Informan Penelitian .....                                         | 33          |
| D. Jenis Data .....                                                  | 34          |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....                                      | 35          |
| F. Uji Keabsahan Data .....                                          | 38          |



|                              |    |
|------------------------------|----|
| G. Teknik Analisis Data..... | 39 |
|------------------------------|----|

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Temuan umum                                                                                                                                                                         |    |
| 1. Sejarah KPU Kota Padang.....                                                                                                                                                        | 42 |
| 2. Profil KPU Kota Padang.....                                                                                                                                                         | 46 |
| 3. Visi Dan Misi.....                                                                                                                                                                  | 47 |
| 4. Profil Relawan Demokrasi.....                                                                                                                                                       | 48 |
| B. Temuan Khusus                                                                                                                                                                       |    |
| 1. Faktor Komunikasi.....                                                                                                                                                              | 52 |
| 2. Sumber Daya .....                                                                                                                                                                   | 55 |
| 3. Disposisi.....                                                                                                                                                                      | 59 |
| 4. Struktur Birokrasi.....                                                                                                                                                             | 61 |
| C. Pembahasan                                                                                                                                                                          |    |
| 1. Implementasi kebijakan program relawan demokrasi oleh KPU Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah 2018 di Kota Padang..... | 63 |
| 2. Faktor penghambat terlaksananya program relawan demokrasi dalam meningkatkan upaya partisipasi politik masyarakat.. .....                                                           | 70 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 72 |
| B. Saran .....      | 73 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel. 1 :Jumlah anggota Relawan Demokrasi Kota Padang pada Pemilihan Kepala daerah 2018**

**Tabel. 2 :Profil Relawan Demokrasi KPU Kota Padang pada Pilkada 2018**

## **DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1 : Struktur Organisasi KPU Kota Padang**

**Gambar 2. Pola koordinasi disajikan**

**Gambar 3: Sosialisasi dengan kelompok perempuan**

**Gambar 4: Sosialisasi dengan kelompok disabilitas**

**Gambar 5: Sosialisasi dengan kelompok marginal**

**Gambar 6: Struktur Birokrasi Program Relawan Demokrasi**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman wawancara
2. Surat Izin Penelitian Dari Fakultas
3. Surat ijin dari kesbangpol
4. Surat balasan dari KPU Kota Padang
5. Foto foto penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Dimana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam melakukan tindakan politik seperti pemilu di harapkan rakyat menggunakan hak memilihnya dan berpartisipasi secara optimal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi politik adalah melalui sosialisasi Pemilu dengan membentuk Relawan Demokrasi.

Relawan Demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya.

Demokrasi sering dimaknai secara prosedural yaitu keberhasilan mengadakan pemilu. Salah satu indikator suksesnya pemilu adalah tingginya tingkat partisipasi pemilih. Di Indonesia dari pemilu masa reformasi sampai dengan saat ini, kecendrungan tingkat pemilih masyarakatnya masih rendah, bahkan cenderung semakin menurun dari tahun ke tahun. .

Pada pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilih mencapai 92,6 persen dan jumlah golput 7,3 persen. Angka partisipasi yang memprihtinkan terjadi pada pemilu 2004, yakni turun hingga 84,1 persen dan jumlah golput meningkat

15,9 persen. Pada pemilu 2009 tingkat partisipasi politik semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9 persen dan jumlah golput semakin meningkat yaitu 29,1 persen, Pada pemilu 2014 tingkat partisipasi politik 75,2 persen sementara yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 24,8 persen, Tingkat partisipasi pada tahun 2014 lebih tinggi sekitar 5 persen dari pemilu sebelumnya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi memilih dan mengantisipasi jumlah golput yang semakin banyak maka sejak Pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan program bernama “Relawan Demokrasi”. Program ini diterapkan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, termasuk di Kota Padang yang dinamakan dengan Relawan Demokrasi Kota Padang. Sesuatu yang perlu jadi perhatian khusus ialah bahwa kebanyakan anggota Relawan Demokrasi di Padang adalah pemuda. Padahal kaum muda adalah salah satu penyumbang besar meningkatnya angka golput di Indonesia.

Kecenderungan masyarakat Padang untuk memberikan hak pilih masih tergolong rendah. Partisipasi memilih masyarakat kota Padang pada Pilkada 2013 hanya sekitar 50 sampai 55 persen. Angka itu jauh dari target KPU secara nasional yaitu 77,5 persen. KPU sebagai penyelenggara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi memilih itu, untuk itulah relawan demokrasi yang terdiri dari 20 orang siap diterjunkan untuk mensosialisasikan Pilkada ke tengah masyarakat.

Kota Padang juga memiliki jumlah kaum difabel yang banyak. Angka yang tinggi ini rupanya belum diantisipasi dengan pemerataan hak-hak politik bagi kaum difabel. Selain kaum difabel, kaum marjinal di Kota Padang

jumlahnya juga banyak. Namun tidak diiringi dengan pemberdayaan terhadap kaum marjinal. Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU Kota Padang dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis Kabupaten/Kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal. Di sisi lain, harus ada upaya untuk meningkatkan partisipasi dimana upaya antisipasi atas situasi kejenuhan dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, mal-administrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya.

Program relawan demokrasi muncul juga dilatarbelakangi oleh inflasi kualitas memilih. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentu tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari.

Pragmatisme memilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (*voluntarisme*) dalam agenda pencerdasan demokrasi, dan masifnya politik tuna ide dari kontestan pemilu. Pemilihan mesti menjadi titik balik persoalan partisipasi memilih yang sebelumnya ada. Angka partisipasi memilih harus meningkat dan inflasi kualitas memilih harus dipulihkan bahwasanya memilih adalah tindakan politik yang mulia. KPU Sumatera Sarat komponen bangsa lainnya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan titik balik itu terwujud.

Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi itu dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua komunitas mampu dijangkau oleh program KPU Kota Padang. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara.

Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi memilih dan kualitas Pemilihan dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.



Berdasarkan observasi awal Relawan Demokrasi memiliki beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya sebagai penyuluh politik, sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang Relawan Demokrasi pada Pilkada Kota Padang 2018, “Kendala yang kami hadapi adalah seperti kurangnya koordinasi antara KPU dengan relawan demokrasi, kurang jelasnya prosedur pelaksanaan dan anggaran yang terbatas.

Sementara dari tatanan KPU Kota Padang masih ditemukan kendala dalam mengimplementasikan program Relawan Demokrasi seperti masih kurangnya dana dan alat peraga, keterbatasan bimbingan teknis serta kurangnya koordinasi, Di samping itu koordinasi yang terbatas menimbulkan tidak adanya pola komunikasi formal yang dapat mempermudah pekerjaan Relawan Demokrasi, ditambah dengan kurangnya intensitas komunikasi. (Al Rafni,Suryanef 2018). Dari beberapa indikator tadi penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Implementasi Kebijakan Program Relawan Demokrasi Oleh Kota Padang Pada Pilkada 2018.

Dalam mengelaborasi implementasi Program Relawan Demokrasi di Kota Padang dapat dilihat dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi (Edwar III 1980:1). Dari sisi komunikasi, antara lain : (1) metode dan pola komunikasi yang dilakukan kepada relawan demokrasi, Relawan Demokrasi, dan segmen sasaran, (2) respon dari segmen sasaran, (3) intensitas komunikasi. Dari sisi sumber daya, antara lain: (1) dana yang dimiliki untuk operasional Relawan Demokrasi, (2) kualitas dan kuantitas SDM, (3) fasilitas yang diberikan. Dari sisi disposisi,

antara lain: (1) komitmen , (2) konsistensi pelaksanaan. Dari sisi struktur birokrasi antara lain: (1). garis hirarki dari KPU ke Relawan Demokrasi, (2) SOP yang diberikan kepada Relawan Demokrasi (Febriantanto, 2018) Berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu tentang Relawan demokrasi.

Penelitian oleh Zamzam Muhammad Fuad (2015) berjudul ***“Peran Pemuda Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Pada Relawan Demokrasi Banyumas, Jawa Tengah)”***. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Relawan Demokrasi Banyumas dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Banyumas pada Pemilu Legislatif 2014. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implikasi Relawan Demokrasi Banyumas terhadap ketahanan politik wilayah di Banyumas.

Penelitian oleh Pangky Febriantanto (2018) berjudul ***“Implementasi Kebijakan Program Relawan Demokrasi Pada Pemilu 2014 di KPU Kota Yogyakarta”*** Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Secara kuantitatif, jumlah pemilih pada pemilihan umum (Pemilu) pasca reformasi cenderung menurun . Realita tersebut membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil kebijakan Relawan Demokrasi (Relasi) yang pengelolanya berada di KPUdi level kota atau kabupaten. Tujuan utama dari kebijakan Relawan Demokrasi adalah meningkatkan

partisipasi pemilih. Di Kota Yogyakarta, kebijakan Program tersebut dinilai berhasil. Ini dilihat dari partisipasi pemilih pada pemilu legislatif 2009 yang menurun dari pemilu legislatif 2004 dan kemudian pada pemilu legislatif 2014 di mana terdapat kebijakan Relawan Demokrasi tingkat partisipasi kembali naik yang menjadi angka partisipasi tertinggi sepanjang pemilu legislatif di Kota Yogyakarta.

Penelitian oleh Weni Wahyu Widyastuti, Suko Wiyono dan Margono yang berjudul ***“Peran Relawan Demokrasi (RELASI) Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Legislatif 2014 Di Kota Malang”***. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih tingginya angka golput di kota Malang. Oleh sebab itu, KPU sebagai lembaga resmi yang bertugas mengurus masalah Pemilu berinisiatif untuk membuat program Relawan Demokrasi (Relasi) di setiap KPUD yang ada di masing-masing daerah. Relasi diharapkan bisa membantu tugas KPU untuk mensosialisasikan Pemilu, hal ini bertujuan agar jumlah partisipasi pemilih bisa meningkat.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat berbagai permasalahan tapi dalam penelitian ini yang mana penulis memfokuskan permasalahan yang akan diteliti adalah implementasi kebijakan program relawan demokrasi oleh KPU kota Padang pada pilkada 2018. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian terdahulu, yang mana penelitian terdahulu meneliti mengenai pemilu legislatif 2014. Sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Implementasi program relawan demokrasi dengan fokus kepada teori George C Edward III

terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi kebijakan program relawan demokrasi oleh KPU Kota Padang untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah 2018 di Kota Padang.
2. Terdapatnya faktor pendukung dan penghambat relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
3. Kurangnya antusias masyarakat terhadap peran relawan demokrasi dalam melakukan sosialisasi politik.
4. Tingginya angka golput pemilih pemula kota Padang.

## **C. BATASAN MASALAH**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana p implementasi kebijakan program relawan demokrasi oleh KPU kota Padang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah 2018 di Kota Padang.

#### **D. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan dari masalah ini adalah

1. Bagaimanakah Implementasi kebijakan program relawan demokrasi oleh KPU Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah 2018 di Kota Padang.
2. Apa apa saja faktor penghambat terlaksananya program relawan demokrasi dalam meningkatkan upaya partisipasi politik masyarakat.

#### **E. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi kebijakan program relawan demokrasi oleh KPU kota Padang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah 2018 di Kota Padang
2. untuk mehetahui aktor pendukung dan penghambat relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat

#### **F. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Meningkatkan kualitas proses pemilu.
2. Meningkatkan partisipasi pemilih.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi.